Abstrak

Waralaba atau *franchise* ialah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis yang dilaksanakan oleh pihak pemberi waralaba (Franchisor). Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1). Penelitian ini mengacu pada waralaba Alfamart antara pemilik Alfamart dengan penerima yaitu *Franchisor*. Perjanjian waralaba tersebut isinya menjadikan perjanjian tersebut perjanjian baku sehingga tidak ada keseimbangan bagi pihak yang diajak bekerjasama karena kurangnya transparasi mengenai isi perjanjian. Perjanjian tersebut memuat Klausula Eksonerasi, klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana kekuatan klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba Alfamart.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, secara normatif peraturan tentang waralaba di kaitkan dengan implementasi, sehingga penelitian ini didasarkan pada teori dan peraturan yang terkait.

Hasil penelitian ini adalah kekuatan klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut tidak ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengikat. Perlindungan hukum bagi para pihak yaitu upaya pengaturan secara tegas dari pemerintah tentang keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba**.**

Kata Kunci : ***Waralaba, Klausula Eksonerasi, Perjanjian***

Abstract

Franchising is a way of cooperating in the field of business carried out by the franchisor. Franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 in Article 1 paragraph (1). This research refers to the Alfamart franchise between the owner of Alfamart and the recipient, namely the Franchisor. The contents of the franchise agreement make the agreement a standard agreement so that there is no balance for the parties invited to cooperate due to the lack of transparency regarding the contents of the agreement. The agreement contains an Exoneration Clause. An exoneration clause is a condition in an agreement in which one party releases himself from the responsibility imposed on him.

The legal problem that arises is how the strength of the exoneration clause and legal protection for the parties in the Alfamart franchise agreement.

The research method used is a normative research method, normatively the regulations on franchising are linked to implementation, so this research is based on related theories and regulations.

The result of this research is that the strength of the exoneration clause in the agreement does not exist and is not in accordance with binding Government Regulations. Legal protection for the parties is an effort to regulate explicitly from the government regarding the balance of the position of the parties in the franchise agreement.

Keywords: Franchise, Exoneration Clause, Agreement